



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**UNIT KERJA** : KECAMATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUBARJILAN**
2. Jabatan : **CAMAT**
3. NHK : **83416**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **404.500.000**

1. Tanah Seluas 150 m2 di BANTUL, WARISAN Rp. 112.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 982 m2/200 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 190 m2 di BANTUL, WARISAN Rp. 142.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **116.000.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO TECNO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. LAINNYA, FIRMAN MESIN GENERATOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
4. MOBIL, TOYOTA AVANZA TYPE G Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
5. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
6. MOTOR, HONDA NEW BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
7. LAINNYA, POLYGON POLYGON Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
8. LAINNYA, POLYGON POLYGON Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 750.000
9. LAINNYA, POLYGON POLYGON Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 750.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	19.750.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	96.474.168
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	636.724.168
III. HUTANG	Rp.	122.260.732
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	514.463.436

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.